



**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
TAHUN 2024**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda Kab. Lamongan) memiliki peran penting dalam mengarahkan dan menyelenggarakan pembangunan di wilayah Kabupaten Lamongan. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan, Bappelitbangda Kab.Lamongan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan memandang pentingnya pengelolaan risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Mengingat kompleksitas dan dinamika lingkungan kerja yang terus berubah, pengelolaan risiko menjadi landasan yang krusial dalam memastikan keberhasilan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kab.Lamongan.

Sebagai tanggapan terhadap tuntutan tersebut, Bappelitbangda Kab.Lamongan telah mengembangkan kebijakan pengelolaan risiko yang komprehensif dan terarah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga untuk merumuskan strategi mitigasi yang tepat guna mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut.

Kebijakan pengelolaan risiko perangkat daerah ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip manajemen risiko yang terpercaya serta sesuai dengan regulasi dan pedoman yang berlaku di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya menjadi panduan bagi internal Bappelitbangda Kab.Lamongan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, penyusunan laporan pengelolaan risiko Bappelitbangda Kab.Lamongan menjadi suatu keharusan guna mengevaluasi kinerja pengelolaan risiko yang telah dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Laporan ini akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

### **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Bupati Lamongan Tahun 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### **D. Ruang Lingkup**

Manajemen risiko pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

### A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Berdasarkan hasil survey persepsi yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh gambaran tentang kondisi lingkungan pengendalian pada awal periode tahun 2024. Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa aspek **“Kepemimpinan yang kondusif”** merupakan aspek dengan nilai tertinggi dalam lingkungan pengendalian saat ini. Sementara itu, aspek **“Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia”** merupakan aspek dengan nilai terendah. Meskipun demikian, secara umum, semua aspek pada lingkungan pengendalian saat ini sudah diterapkan dengan baik.

**Tabel 1. Hasil Survey Persepsi  
Kondisi Lingkungan Pengendalian**

No	Aspek	Nilai	Kategori
A	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
B	Komitmen Terhadap Kompetensi	3.25	Sudah diterapkan dengan baik, tapi masih ditingkatkan
C	Kepemimpinan yang Kondusif	4.00	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
D	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
E	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	3.67	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain
F	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia	3.00	Sudah diterapkan dengan baik, tapi masih ditingkatkan
G	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif	3.20	Sudah diterapkan dengan baik, tapi masih ditingkatkan
H	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3.50	Sudah diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

### B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil survey persepsi yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan pada awal periode tahun 2024, meskipun secara umum lingkungan pengendalian sudah diterapkan dengan baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar mendukung penciptaan budaya pengendalian risiko yang lebih

efektif di pemerintah daerah. Oleh karena itu, berikut adalah rencana perbaikan lingkungan pengendalian yang diusulkan:

1. Penguatan Kebijakan Pembinaan Sumber Daya Manusia

- Mengidentifikasi kekurangan dan celah dalam penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan Bappelitbangda.
- Mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai terkait dengan pengelolaan risiko.
- Mendorong partisipasi aktif pegawai dalam kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang terkait dengan manajemen risiko.

2. Peningkatan Kesadaran dan Keterlibatan Pegawai

- Menggelar kampanye kesadaran tentang pentingnya pengendalian risiko dan peran masing-masing pegawai dalam menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif.
- Membentuk tim khusus atau komite pengendalian risiko yang terdiri dari perwakilan dari berbagai unit kerja di Bappelitbangda untuk mengkoordinasikan upaya-upaya pengendalian risiko.
- Mendorong terciptanya budaya terbuka dan kolaboratif di antara pegawai dalam berbagi informasi dan pengalaman terkait dengan manajemen risiko.

3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Kepemimpinan

- Memberikan pelatihan khusus kepada pimpinan dan manajer di Bappelitbangda tentang konsep dan praktik terkait dengan kepemimpinan yang mendukung budaya pengendalian risiko.
- Mendorong para pimpinan untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip pengendalian risiko dalam pengambilan keputusan dan manajemen operasional sehari-hari.

4. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

- Menetapkan sistem evaluasi dan pemantauan berkala terhadap implementasi rencana perbaikan lingkungan pengendalian untuk memastikan efektivitasnya.
- Melakukan peninjauan rutin terhadap capaian-capaian dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan lingkungan pengendalian di Bappelitbangda.

### III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

#### A. Penetapan Konteks/Tujuan

#### Konteks Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan		
Tahun Penilaian	2024		
Periode yang Dinilai	2024		
Urusan Pemerintahan	Perencanaan pembangunan, litbang		
OPD yang Dinilai	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		
Tujuan Strategis	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan 2. Meningkatnya Inovasi Daerah 3. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah		
IKU Renstra OPD		IKU	Ket
	1	Prosentase Indikator Kinerja Daerah Yang Tercapai	76,47%
	2	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Yang Tercapai	79,01%
	3	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	75,23%
	4	Indeks Inovasi Daerah (IID)	42,00
	5	Nilai SAKIP Bappelitbangda	89,83

## B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta risiko sebagai berikut, yang terdiri dari:

### ● Risiko Strategis Organisasi (RSO)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan	Prosentase Indikator Kinerja Daerah yang Tercapai	Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi	RSO.24.36.10.01	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya pemantauan dan analisis tren dan kurangnya sumber daya untuk melakukan penelitian dan analisis lingkungan	SDM, Teknologi, Metode, Kondisi Ekonomi	UC	Keputusan perencanaan yang tidak adaptif terhadap perubahan lingkungan dan tidak mampu mengatasi masalah yang muncul secara tiba-tiba	Kepala Daerah & Masyarakat
		Perencanaan pembangunan daerah tidak berkualitas	RSO.24.36.10.02	Kepala Bappelitbangda	- Kurangnya keahlian perencanaan, kurangnya waktu untuk perencanaan yang baik - Ketidaksesuaian strategi perencanaan dengan kebutuhan daerah	SDM, Teknologi, Metode	C	Pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak efisien, kurangnya inovasi dalam perencanaan, dan ketidakmampuan mencapai target kinerja	Kepala Daerah & Masyarakat
	Prosentase Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Tercapai	Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi pelaksanaan program pembangunan	RSO.24.36.10.03	Kepala Bappelitbangda	Alokasi anggaran yang tidak memadai, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, atau fluktuasi ekonomi yang berdampak pada sumber daya pembangunan	Anggaran, SDM, Kondisi Ekonomi	UC	Tidak dapat mencapai target kinerja utama perangkat daerah, menghambat progres menuju sasaran strategis, dan berpotensi menurunkan motivasi tim perangkat daerah.	Perangkat Daerah dan Masyarakat
		Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal	RSO.24.36.10.04	Kepala Bappelitbangda	Sistem pelaporan yang kurang efektif, kurangnya sumber daya untuk monitoring yang memadai, atau kurangnya integrasi data dari berbagai	SDM, Teknologi, Metode	C	Kurangnya keakuratan dan keandalan data, membuat pengambilan keputusan sulit, dan menghambat penilaian yang akurat terhadap pencapaian indikator	Bappelitbangda & Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
					perangkat daerah.			kinerja utama perangkat daerah.	
	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Monitoring dan evaluasi program perangkat daerah tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.05	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya sumber daya untuk monitoring dan evaluasi, kelemahan dalam sistem pelaporan, atau kurangnya keterlibatan perangkat daerah dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi program.	SDM, Teknologi, Metode	C	Kesulitan dalam menilai pencapaian indikator program, kurangnya pemahaman tentang dampak nyata dari kebijakan dan program yang diimplementasikan, dan menghambat upaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan.	Bappelitbangda & Perangkat Daerah
		Perubahan mendadak dalam kebijakan pembangunan	RSO.24.36.10.06	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya persiapan untuk perubahan kebijakan pemerintah atau fluktuasi anggaran yang tiba-tiba, atau ketidakmampuan merespons secara cepat terhadap perubahan tersebut.	SDM, Teknologi, Metode	C	Pelaksanaan program terhambat, progres terhenti, atau bahkan pembatalan program karena ketidakmampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan mendadak.	Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Meningkatnya Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan	RSO.24.36.10.07	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya pelatihan atau komunikasi yang efektif tentang arti dan pentingnya inovasi, kurangnya pemahaman tentang peran individu dalam proses inovasi.	SDM, Teknologi, Metode	C	Kurangnya partisipasi aktif dalam inisiatif inovatif, keterlambatan dalam mengadopsi praktik inovatif, dan penurunan indeks inovasi daerah.	Bappelitbangda & Perangkat Daerah
		Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan	RSO.24.36.10.08	Kepala Bappelitbangda	Keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur penelitian dan pengembangan yang memadai, atau ketidakmampuan untuk menarik talenta yang ahli di bidang R&D.	SDM, Teknologi, Metode, Anggaran	C	Kurangnya kemampuan untuk menghasilkan ide-ide inovatif, penurunan produktivitas R&D, dan penurunan indeks inovasi daerah.	Bappelitbangda & Perangkat Daerah
		Proses pengembangan inovasi tidak	RSO.24.36.10.09	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya pemahaman tentang pentingnya inovasi,	SDM, Teknologi, Metode	C	Penghambatan inisiatif inovasi, kurangnya ide kreatif, dan	Bappelitbangda & Perangkat Daerah



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
		didukung oleh para pemangku kepentingan			ketidaknyamanan dengan perubahan, atau ketidakpastian tentang manfaat inovasi bagi semua pihak terkait.			ketidakmampuan untuk mencapai target Indeks Inovasi Daerah.	
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappelitbangda	Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.36.10.10	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya pelatihan manajerial, ketidaksesuaian keterampilan, atau kekurangan pengalaman dalam pengelolaan internal perangkat daerah.	SDM, Teknologi, Metode	C	Keterbatasan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas internal dapat menghambat efisiensi dan efektivitas manajemen.	Bappelitbangda
		Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.11	Kepala Bappelitbangda	Kurangnya investasi dalam sistem informasi, kurangnya integrasi data, atau sistem yang tidak mendukung kebutuhan manajerial.	SDM, Teknologi, Anggaran	C	Kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja, kurangnya transparansi dalam pengelolaan internal, dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang didukung oleh data yang akurat.	Bappelitbangda

### ● Risiko Operasional Organisasi (ROO)

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Menurunnya validitas dan akseptabilitas rencana serta alokasi anggaran	ROO.24.36.10.01	Sekretaris Bappelitbangda	Komunikasi yang tidak efektif, kurangnya kesadaran stakeholder, atau perubahan kebijakan yang tidak dipahami dengan baik.	SDM, Teknologi, Metode	C	Rencana yang tidak mencerminkan kebutuhan nyata, alokasi anggaran yang tidak optimal, dan penilaian kinerja yang tidak akurat.	Kepala & Pegawai Bappelitbangda
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Risiko penyalahgunaan dana atau kehilangan aset	ROO.24.36.10.02	Sekretaris Bappelitbangda	Lemahnya pengawasan internal, kurangnya kebijakan yang jelas, atau kurangnya	SDM, Teknologi, Metode	C	Potensi kehilangan dana, reputasi yang tercemar, dan konsekuensi	Kepala & Pegawai Bappelitbangda

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
					pelatihan untuk staf keuangan.			hukum.	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kepegawaian	Menurunnya produktivitas dan kinerja pegawai	ROO.24.36.10.03	Sekretaris Bappelitbangda	Kebijakan kepegawaian yang tidak jelas, kurangnya pelatihan untuk manajer, atau kurangnya insentif untuk kinerja yang baik.	SDM, Teknologi, Metode	C	Menurunnya kesinambungan dalam pencapaian tujuan organisasi.	Kepala & Pegawai Bappelitbangda
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa	Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah	ROO.24.36.10.04	Sekretaris Bappelitbangda	Sistem administrasi yang tidak terorganisir, kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi	SDM, Teknologi, Metode	C	Lambatnya proses administratif, potensi kehilangan data, dan kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi dasar.	Kepala & Pegawai Bappelitbangda
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang dan Jasa	Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.	ROO.24.36.10.05	Sekretaris Bappelitbangda	Kurangnya klarifikasi dan komunikasi yang jelas terkait spesifikasi barang. Tidak adanya mekanisme pemeriksaan dan pengujian kualitas barang.	SDM, Teknologi, Metode	C	Penurunan kualitas pelayanan atau proyek yang menggunakan barang tersebut. Potensi kerugian finansial akibat pengadaan ulang atau perbaikan barang. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.	Kepala & Pegawai Bappelitbangda
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pelayanan yang Tersedia Dengan Baik	Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ROO.24.36.10.06	Sekretaris Bappelitbangda	Kurangnya koordinasi antara penyedia jasa dan pemerintah daerah. Tidak adanya mekanisme pemantauan kinerja penyedia jasa.	SDM, Teknologi, Metode	C	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Penurunan efisiensi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.	Kepala & Pegawai Bappelitbangda
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan	ROO.24.36.10.07	Sekretaris Bappelitbangda	Kurangnya perencanaan pemeliharaan preventif, kurangnya anggaran	SDM, Teknologi, Metode	C	Kerusakan barang yang tidak terduga, penurunan kinerja, dan biaya	Kepala & Pegawai Bappelitbangda

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
Urusan Pemerintahan Daerah		biaya pemeliharaan yang tinggi.			untuk pemeliharaan, atau kurangnya staf yang terlatih.			pemeliharaan yang tidak terduga.	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyusun Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan	ROO.24.36.10.08	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kurangnya koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, ketidakpastian anggaran, atau perubahan kebijakan yang mendadak.	SDM, Teknologi, Metode	C	Tidak tercapainya proyek atau program yang direncanakan, ketidakpastian anggaran, dan penurunan kepercayaan stakeholder.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Dianalisis	Kurangnya kualitas analisis data	ROO.24.36.10.09	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kurangnya keahlian analisis data, keterbatasan akses data yang akurat, atau kurangnya penggunaan teknologi informasi.	SDM, Teknologi, Metode, Anggaran	C	Kesalahan interpretasi data, perencanaan yang tidak berbasis bukti, dan penurunan kualitas keputusan perencanaan.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi	ROO.24.36.10.10	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Kurangnya pengembangan sistem evaluasi kinerja, kurangnya pengawasan, atau tidak adanya mekanisme pelaporan yang efektif.	SDM, Teknologi, Metode, Anggaran	C	Ketidakjelasan terkait pencapaian sasaran, kesulitan dalam perbaikan kebijakan, dan penurunan akuntabilitas.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	ROO.24.36.10.11	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kurangnya komunikasi antarbidang, perbedaan prioritas, dan kurangnya pemahaman tentang kebutuhan masyarakat.	SDM, Teknologi, Metode	C	Tidak optimalnya pemanfaatan sumber daya, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, dan peningkatan kesenjangan pembangunan.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan	Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan	ROO.24.36.10.12	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Keterbatasan pemahaman bersama tentang kebutuhan dan aspirasi masing-masing	SDM, Teknologi, Metode	C	Ketidakselarasan kebijakan sektoral, potensi tumpang tindih proyek-proyek	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
dan SDA (Sumber Daya Alam)	Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	bidang perekonomian dan sumber daya alam			sektor, kurangnya dialog dan pertukaran informasi antarbidang, atau kurangnya mekanisme kolaboratif dalam perencanaan.			pembangunan, dan terhambatnya pertumbuhan ekonomi sektor-sektor terkait.	
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Selaras dan Berorientasi Hasil Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	ROO.24.36.10.13	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kurangnya koordinasi antarbidang, ketidaksesuaian prioritas pembangunan, atau kurangnya pemahaman tentang dinamika wilayah.	SDM, Teknologi, Metode	C	Pembangunan infrastruktur yang tidak optimal, ketidaksesuaian dengan tata ruang kawasan, dan meningkatnya tekanan pada sumber daya alam.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Ketidakmampuan Mengadopsi Perubahan Berdasarkan Hasil Penelitian	ROO.24.36.10.14	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman terkait implikasi hasil penelitian, atau kebijakan yang kaku	SDM, Metode	C	Resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman terkait implikasi hasil penelitian, atau kebijakan yang kaku	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Sosial dan Kependudukan	Ketidakpastian Kualitas Data	ROO.24.36.10.15	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Keterbatasan akses terhadap data yang relevan atau ketidakpastian terkait kualitas data yang digunakan.	SDM, Teknologi, Metode	C	Riset dengan metodologi yang lemah dan hasil yang tidak dapat diandalkan.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Hasil Penelitian/Kajian Yang Ditindaklanjuti Lingkup Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kurangnya Fokus pada Isu-Isu Pembangunan Ekonomi yang Mendesak	ROO.24.36.10.16	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kurangnya pemahaman atau respons terhadap isu-isu terkini di bidang pembangunan ekonomi.	SDM, Teknologi, Metode	C	Riset yang tidak relevan atau tidak dapat menjawab tantangan pembangunan ekonomi yang aktual.	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Inovasi dan Teknologi Yang Dikembangkan	Kurangnya fokus pada pengembangan inovasi dan	ROO.24.36.10.17	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Kurangnya dana untuk inovasi, kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam	SDM, Teknologi, Metode, Anggaran	C	Terhambatnya adopsi teknologi modern, kesulitan dalam	Kepala Bappelitbangda & Perangkat Daerah

Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
		teknologi			pengembangan teknologi, atau kurangnya pemahaman tentang kebutuhan pasar lokal.			meningkatkan efisiensi, dan kurangnya daya saing dalam menghadapi tantangan global.	

### C. Hasil Analisis Risiko

- Skala Risiko

Skala Nilai Risiko	Kategori	Penerimaan Risiko	Tindakan
1,00 - 2,00	Sangat Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
2,01 - 4,00	Rendah	Dapat diterima	Tidak diperlukan tindakan
4,01 - 9,00	Sedang	Diperlukan pengendalian yang lebih baik	Disarankan diambil tindakan jika tersedia sumber daya
9,01 - 12,00	Tinggi	Harus menjadi perhatian manajemen	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko
12,01 - 25,00	Sangat Tinggi	Tidak dapat diterima	Diperlukan tindakan untuk mengelola risiko

● **Hasil Analisis Risiko**

Berdasarkan hasil diskusi dan pemetaan yang dilakukan pada Bappelitbangda Kabupaten Lamongan, maka diperoleh peta penilaian risiko sebagai berikut:

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi	RSO.24.36.10.01	3	2	6
Perencanaan pembangunan daerah tidak berkualitas	RSO.24.36.10.02	4	2	8
Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi pelaksanaan program pembangunan	RSO.24.36.10.03	4	2	8
Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal	RSO.24.36.10.04	3	3	9
Monitoring dan evaluasi program perangkat daerah tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.05	3	2	6
Perubahan mendadak dalam kebijakan pembangunan	RSO.24.36.10.06	3	2	6
Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan	RSO.24.36.10.07	2	3	6
Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan	RSO.24.36.10.08	3	3	9
Proses pengembangan inovasi tidak didukung oleh para pemangku kepentingan	RSO.24.36.10.09	3	2	6
Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.36.10.10	3	1	3
Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.11	3	2	6

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Menurunnya validitas dan akseptabilitas rencana serta alokasi anggaran	ROO.24.36.10.01	4	1	4
Risiko penyalahgunaan dana atau kehilangan aset	ROO.24.36.10.02	4	1	4

Risiko		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
Uraian	Kode			
Menurunnya produktivitas dan kinerja pegawai	ROO.24.36.10.03	4	2	8
Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah	ROO.24.36.10.04	3	2	6
Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.	ROO.24.36.10.05	4	2	8
Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ROO.24.36.10.06	3	1	3
Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.24.36.10.07	3	1	3
Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan	ROO.24.36.10.08	3	2	6
Kurangnya kualitas analisis data	ROO.24.36.10.09	3	2	6
Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi	ROO.24.36.10.10	3	2	6
Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	ROO.24.36.10.11	3	2	6
Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	ROO.24.36.10.12	3	2	6
Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	ROO.24.36.10.13	3	2	6
Ketidakmampuan Mengadopsi Perubahan Berdasarkan Hasil Penelitian	ROO.24.36.10.14	3	3	9
Ketidakpastian Kualitas Data	ROO.24.36.10.15	3	2	6
Kurangnya Fokus pada Isu-Isu Pembangunan Ekonomi yang Mendesak	ROO.24.36.10.16	3	2	6
Kurangnya fokus pada pengembangan inovasi dan teknologi	ROO.24.36.10.17	2	3	6

#### **D. Rencana Tindak Pengendalian yang Sudah Dilakukan**

Berdasarkan uraian risiko yang telah dipaparkan, terdapat beberapa pengendalian yang sudah dilakukan, celah pengendalian dan pengendalian yang masih dibutuhkan. Berikut ini daftar uraian rencana tindak pengendalian atas risiko di lingkup Bappelitbangda Kabupaten Lamongan:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Strategis OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:</b>							
1	Tren perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi yang tidak terprediksi	RSO.24.36.10.01	Menerapkan sistem pelaporan yang efisien dan terstruktur untuk memantau perubahan lingkungan dan kondisi sosial ekonomi.	Keterlambatan dalam pelaporan atau kurangnya transparansi dalam pertukaran informasi antara berbagai pihak terkait.	Meningkatkan kemampuan pemantauan tren dan perubahan lingkungan, melibatkan ahli terkait dalam analisis situasional, dan menyusun perubahan rencana kerja pemerintah daerah	Kepala Bappelitbangda	Agustus 2024
2	Perencanaan pembangunan daerah tidak berkualitas	RSO.24.36.10.02	Menyusun panduan perencanaan yang jelas dan mudah diakses bagi seluruh tim perencanaan, sehingga mereka memiliki pedoman yang konsisten dalam menyusun rencana pembangunan daerah.	Panduan perencanaan yang tidak selalu diterapkan secara konsisten atau dipahami dengan baik oleh seluruh anggota tim, sehingga mengurangi efektivitas dalam penyusunan rencana pembangunan.	Meningkatkan kapasitas tim perencanaan, menyusun panduan perencanaan yang jelas, dan melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas perencanaan	Kepala Bappelitbangda	Mei 2024
3	Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi pelaksanaan program pembangunan	RSO.24.36.10.03	Mengoptimalkan alokasi sumber daya dengan melakukan peninjauan yang berkala dan mendalam terhadap anggaran yang tersedia, serta memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien sesuai dengan tujuan pembangunan.	"Kurangnya mekanisme atau prosedur yang jelas dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, sehingga terjadi risiko pengalokasian yang kurang efisien atau tidak tepat sasaran.	Melakukan analisis dampak anggaran secara berkala (program prioritas), mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.	Kepala Bappelitbangda	Juni 2024
4	Monitoring dan pelaporan program pembangunan tidak berjalan dengan optimal	RSO.24.36.10.04	Melibatkan perangkat daerah atau unit kerja terkait untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat, serta memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya pelaporan yang tepat waktu dan akurat.	Kurangnya keterlibatan atau dukungan dari perangkat daerah atau unit kerja terkait dalam memverifikasi dan menyediakan data yang diperlukan, yang dapat menghambat proses pelaporan yang optimal.	Meningkatkan sistem pelaporan dengan teknologi informasi yang lebih baik, memperkuat kontrol kualitas data, dan melibatkan perangkat daerah untuk memverifikasi dan menyediakan data yang akurat.	Kepala Bappelitbangda	Juni 2024
5	Monitoring dan evaluasi program perangkat daerah tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.05	Mengalokasikan sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk personel maupun teknologi, untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi.	"Ketidakcocokan atau kurangnya integrasi antara sistem monitoring dan evaluasi dengan sistem manajemen program perangkat daerah, yang dapat menghambat efisiensi dalam pengumpulan dan analisis data.	Meningkatkan alokasi sumber daya untuk monitoring dan evaluasi, memperbarui dan meningkatkan sistem pelaporan, serta melibatkan perangkat daerah dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan data yang akurat dan analisis yang mendalam.	Kepala Bappelitbangda	Juni 2024
6	Implementasi program inovasi daerah tidak berjalan secara berkelanjutan	RSO.24.36.10.07	Menetapkan tujuan jangka panjang dan strategis untuk setiap program inovasi, serta mengukur kemajuan secara teratur terhadap pencapaian tujuan tersebut.	Kurangnya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah atau pemangku kepentingan lainnya terhadap program inovasi, yang dapat menghambat kelangsungan program.	Melakukan program pelatihan tentang inovasi, mengkomunikasikan nilai inovasi secara konsisten, dan menciptakan budaya kerja yang mendukung eksperimen dan ide kreatif.	Kepala Bappelitbangda	Oktober 2024



No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Sumber daya dan anggaran tidak mencukupi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan	RSO.24.36.10.08	Menetapkan prioritas penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah.	"Kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk penelitian dan pengembangan akibat prioritas yang lebih tinggi atau persaingan dengan program-program lain yang membutuhkan pendanaan.	Meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung R&D, membangun kemitraan dengan institusi pendidikan dan penelitian, dan menciptakan insentif untuk program R&D.	Kepala Bappelitbangda	Agustus 2024
8	Proses pengembangan inovasi tidak didukung oleh para pemangku kepentingan	RSO.24.36.10.09	Melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan dengan para pemangku kepentingan untuk menjelaskan manfaat dan pentingnya pengembangan inovasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.	"Kurangnya pemahaman atau kesadaran dari para pemangku kepentingan tentang manfaat dan potensi inovasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan daerah.	Melibatkan aktif semua pemangku kepentingan dalam proses inovasi, meningkatkan komunikasi tentang manfaat inovasi, dan memberikan insentif atau pengakuan bagi kontributor inovasi.	Kepala Bappelitbangda	Juli 2024
9	Menurunnya kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah	RSO.24.36.10.10	Melakukan evaluasi rutin terhadap kapasitas manajerial aparatur perangkat daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang spesifik.	Kurangnya sumber daya yang dialokasikan untuk pelatihan dan pengembangan aparatur perangkat daerah, yang dapat menyebabkan keterbatasan dalam program yang ditawarkan.	Memberikan pelatihan manajerial berkala, melakukan evaluasi kebutuhan keterampilan secara rutin, dan memberikan dukungan dalam pengembangan kepemimpinan internal.	Kepala Bappelitbangda	Oktober 2024
10	Sistem informasi manajemen internal tidak berjalan efektif	RSO.24.36.10.11	Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem informasi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menggunakan sistem tersebut secara efektif.	Ketidacocokan antara sistem informasi yang ada dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi, yang dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam penggunaannya.	Meningkatkan integrasi sistem manajemen internal, merumuskan standar prosedur operasional yang jelas, dan memberikan pelatihan kepada staf untuk memastikan pemahaman dan penggunaan yang efektif dari sistem tersebut.	Kepala Bappelitbangda	Oktober 2024
11	Perubahan mendadak dalam kebijakan pembangunan	RSO.24.36.10.06	Menerapkan mekanisme komunikasi dan koordinasi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan dipahami dan dapat dikelola secara efektif.	Kurangnya komunikasi atau koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta antara sektor publik dan swasta, yang dapat menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi perubahan kebijakan.	Membangun rencana kontinjensi untuk setiap program (manajemen risiko), melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan kebijakan atau anggaran, dan memiliki mekanisme yang memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi.	Kepala Bappelitbangda	Oktober 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
<b>Risiko Operasional OPD Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah:</b>							
1	Menurunnya validitas dan akseptabilitas rencana serta alokasi anggaran	ROO.24.36.10.01	Melakukan konsultasi dengan mitra perencanaan dalam proses perencanaan dan alokasi anggaran.	-	Melibatkan secara aktif semua pemangku kepentingan, meningkatkan komunikasi, dan menyelenggarakan sesi pemahaman kebijakan secara rutin.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
2	Risiko penyalahgunaan dana atau kehilangan aset	ROO.24.36.10.02	"Menerapkan prosedur pengawasan dan pengendalian yang ketat dalam penggunaan dana dan pengelolaan aset. "	-	Meningkatkan pengawasan internal, menyusun dan memperbarui kebijakan keuangan, serta menyelenggarakan pelatihan reguler untuk staf keuangan.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
3	Menurunnya produktivitas dan kinerja pegawai	ROO.24.36.10.03	Memberikan pelatihan dan pengembangan yang terstruktur untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pegawai.	-	Memperbarui kebijakan kepegawaian, menyelenggarakan pelatihan manajerial, dan memberikan insentif yang sesuai untuk kinerja yang baik.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
4	Inefisiensi administrasi umum perangkat daerah	ROO.24.36.10.04	"Menerapkan proses administrasi standar yang terdokumentasi untuk mengurangi keragaman dalam prosedur dan mempercepat pemrosesan. "	-	Meningkatkan sistem administrasi, mengadopsi teknologi informasi yang lebih baik, dan memastikan adanya cukup sumber daya manusia untuk mendukung fungsi administrasi.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
5	Barang yang diperoleh melalui pengadaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.	ROO.24.36.10.05	"Menetapkan prosedur pengadaan yang jelas dan terdokumentasi, termasuk persyaratan spesifikasi yang harus dipenuhi oleh penyedia barang atau jasa. "	-	"Melakukan klarifikasi yang jelas terkait spesifikasi barang sejak awal proses pengadaan. Melibatkan pihak yang berkompeten dalam menentukan dan memeriksa spesifikasi barang. Menerapkan mekanisme pemeriksaan dan pengujian kualitas secara berkala."	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
6	Kurangnya kualitas atau tidak optimalnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	ROO.24.36.10.06	"Menyusun kontrak yang jelas dan rinci dengan kriteria kualitas yang jelas, serta mekanisme penyelesaian sengketa atau klaim jika kualitas layanan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. "	-	"Melakukan analisis kebutuhan yang mendalam sebelum mengontrak penyedia jasa. Menyusun kontrak yang mengikat dan mencakup indikator kinerja yang jelas. Melakukan pemantauan kinerja secara rutin dan memberikan umpan balik kepada penyedia jasa."	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
7	Kerusakan barang, penurunan efisiensi, dan biaya pemeliharaan yang tinggi.	ROO.24.36.10.07	"Melakukan pemantauan teratur terhadap kondisi barang untuk mendeteksi kerusakan atau keausan secara dini. "	-	Meningkatkan perencanaan pemeliharaan preventif, mengalokasikan anggaran yang memadai, dan melibatkan staf yang terlatih dalam kegiatan pemeliharaan.	Sekretaris Bappelitbangda	Agustus 2024
8	Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pendanaan	ROO.24.36.10.08	"Melakukan analisis dan perencanaan anggaran yang cermat untuk memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. "	-	Meningkatkan koordinasi antara tim perencanaan dan keuangan, menyusun rencana cadangan untuk perubahan kebijakan atau anggaran, dan memperbarui perencanaan secara berkala.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Mei 2024

9	Kurangnya kualitas analisis data	ROO.24.36.10.09	"Melibatkan ahli atau konsultan data yang memiliki keahlian khusus dalam analisis data untuk memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam. "	-	Meningkatkan keahlian analisis data, meningkatkan ketersediaan data yang akurat, dan mengadopsi teknologi informasi untuk analisis data yang lebih efektif.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Juni 2024
10	Kurangnya sistem pengendalian dan evaluasi	ROO.24.36.10.10	"Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengendalian yang ada dan membuat perbaikan atau penyesuaian jika diperlukan. "	-	Melakukan perbaikan sistem evaluasi kinerja yang efektif, meningkatkan pengawasan, dan menyusun mekanisme pelaporan berkala yang transparan.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Juni 2024
11	Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan dan kebijakan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	ROO.24.36.10.11	"Mengadakan pertemuan atau forum koordinasi rutin antara unit-unit atau departemen terkait untuk berbagi informasi, berkoordinasi, dan menyinkronkan kegiatan pembangunan. "	-	Meningkatkan komunikasi antarbidang, menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, dan menyusun rencana strategis bersama antara bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Juni 2024
12	Kurangnya sinergi program dan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	ROO.24.36.10.12	Melakukan koordinasi reguler antara unit-unit atau departemen terkait untuk berbagi informasi, menyinkronkan kegiatan	-	Meningkatkan dialog antarbidang dengan menggelar pertemuan berkala, menyusun rencana strategis bersama yang mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor mitra, dan membentuk tim koordinasi lintas sektoral untuk pemantauan dan evaluasi proyek.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	Juni 2024
13	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan tidak terarah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat	ROO.24.36.10.13	"Menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi di tingkat wilayah. "	-	Meningkatkan koordinasi antara bidang infrastruktur dan kewilayahan, menyusun rencana tata ruang terintegrasi, dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memahami kebutuhan lokal.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Juni 2024
14	Ketidakmampuan Mengadopsi Perubahan Berdasarkan Hasil Penelitian	ROO.24.36.10.14	Melakukan pelatihan dan pembinaan kepada staf terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam mengadopsi perubahan berdasarkan hasil penelitian.	-	Melibatkan pemangku kepentingan dalam tahap awal riset, menyusun rencana perubahan yang baik komunikasi efektif.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Agustus 2024
15	Ketidakpastian Kualitas Data	ROO.24.36.10.15	Melibatkan ahli data atau spesialis dalam memeriksa dan mengevaluasi kualitas data secara berkala.	-	Meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan, memperluas akses terhadap data yang relevan, atau menggunakan metode analisis yang dapat mengatasi keterbatasan data.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Agustus 2024
16	Kurangnya Fokus pada Isu-Isu Pembangunan Ekonomi yang Mendesak	ROO.24.36.10.16	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan atau program yang ditujukan untuk menangani isu-isu tersebut.	-	Meningkatkan pemahaman dan pemantauan isu-isu pembangunan ekonomi, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk identifikasi prioritas, dan merinci rencana penelitian yang berfokus.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Agustus 2024
17	Kurangnya fokus pada pengembangan inovasi dan teknologi	ROO.24.36.10.17	"Mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan akademisi untuk mempercepat pengembangan inovasi dan teknologi. "	-	Meningkatkan alokasi dana untuk inovasi dan teknologi, mendorong partisipasi sektor swasta dalam pengembangan teknologi, dan melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan potensi lokal.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Oktober 2024

#### **IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Dalam konteks Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda), rancangan informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam mendukung efektivitas pengendalian risiko. Berikut adalah deskripsi dari berbagai elemen rancangan informasi dan komunikasi yang diperlukan:

1. Rapat Koordinasi Internal
2. Surat Edaran
3. Bimbingan Teknis
4. Monitoring Implementasi
5. Pelatihan dan Diklat
6. Sistem Aplikasi
7. Sosialisasi
8. Pengaturan MOU
9. Kontrak
10. Proposal, dan
11. Kebijakan

#### **V. RANCANGAN PEMANTAUAN**

Mekanisme pemantauan yang akan diimplementasikan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau dengan tepat dan pengendalian yang telah dirancang dapat dijalankan dan berjalan efektif. Mekanisme pemantauan yang akan digunakan meliputi:

1. Konfirmasi Persiapan:  
Sebelum pelaksanaan setiap kegiatan atau proyek, akan dilakukan konfirmasi persiapan untuk memastikan bahwa semua pengendalian yang diperlukan telah dipersiapkan dengan baik. Konfirmasi persiapan melibatkan verifikasi bahwa langkah-langkah mitigasi risiko yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan:  
Setelah kegiatan atau proyek selesai dilaksanakan, akan disusun laporan pelaksanaan kegiatan yang mencakup evaluasi terhadap implementasi pengendalian risiko yang telah direncanakan. Laporan pelaksanaan kegiatan ini akan memuat informasi mengenai pelaksanaan pengendalian, potensi permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah atau akan dilakukan.

#### **VI. PENUTUP**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola risiko-risiko yang terkait dengan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Bappelitbangda) telah menguraikan dan menerapkan berbagai strategi dan mekanisme pengendalian risiko yang telah dirancang. Dengan komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh jajaran, diharapkan upaya-upaya ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Sebagai penutup, kami ingin menyatakan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dan implementasi penilaian risiko serta pengelolaan risiko di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Lamongan. Dengan kerjasama dan dedikasi dari semua pihak, kami yakin bahwa Bappelitbangda Kabupaten Lamongan akan terus menjadi motor penggerak pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di masa yang akan datang.

Lamongan, Januari 2024  
**Kepala BAPPELITBANGDA**  
**Kabupaten Lamongan**



**SUJARWO, ST., MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19740930 200112 1 005